

## **BAB II**

### **PENERIMAAN INDONESIA TERHADAP KEINGINAN TIMOR LESTE BERGABUNG ASEAN**

Dalam penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Pada bab ini tiga faktor tersebut akan penulis elaborasikan dengan sub-sub yang penulis sajikan. Karena Ketiga pertimbangan di atas memiliki peran yang saling berkesinambungan dalam mempengaruhi pertimbangan pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Konteks dalam negeri yang terdiri atas politik dalam negeri, kekuatan ekonomi dan militer berperan bersama dengan konteks internasional dalam membentuk arah politik luar negeri. Ketiga pertimbangan tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan.

Apalagi kedekatan geografis berhubungan dengan perdagangan antar negara, serta keanggotaan bersama dalam organisasi-organisasi antar-pemerintah. Demikian halnya dengan aspek ekonomi yang merupakan bagian penting dalam konteks internasional. Arus barang dan jasa maupun arus modal menciptakan pola ketergantungan suatu negara terhadap Negara lain. Selain itu, aspek politis yang digambarkan dengan hubungan politis antarnegara juga berperan besar dalam politik luar negeri suatu negara. Menurut Coplin aliansi keamanan dapat berdampak besar terhadap anggota maupun non-anggota aliansi dalam perumusan politik luar negeri

Sebagai mantan salah satu provinsi di Indonesia, Timor Leste mempunyai hubungan emosional yang mendalam dengan bangsa Indonesia. Hubungan emosional yang dimaksud adalah kedekatan wilayah, kedekatan suku bangsa yang dimana di daerah perbatasan Indonesia –

Timor Leste memiliki Bahasa daerah yang sama yakni Bahasa “tetun”, perbatasan tersebut meliputi wilayah Atambua, Atapupu, Malaka dan Kefa yang merupakan daratan yang disebut “Pulau Timor”, di tempat inilah yang kemudian banyak ditinggali warga eks Timor Timur. Karena kedekatan wilayah tersebut maka tidak heran jika banyak orang di perbatas yang memiliki keluarga di Timor Leste. Sehingga secara budaya meliki kemiripan.

Disamping faktor budaya dan historis, selama pendudukan Indonesia juga banyak melakukan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia (lengkapnya akan dijelaskan di sub berikut), namun juga selama masa pendudukan oleh Indonesia banyak investasi finansial yang Indonesia gelontorkan bagi Timor Timur (lengkapnya akan dijelasakn di sub bab dibawah), karena banyak investasi yang di gelontorkan maka pendidikan juga bagian dari pada perhatian Indonesia di Timor Leste mengingat kedekatan histori kedua negara dan ditambah lagi semasa pendudukan Indonesia, Bahasa Indonesia juga sudah menjadi Bahasa keseharian rakyat Timor Timur. Dari aspek-aspek diatas lah akan penulis analisis menggunakan Rational Choice Theory (Decision-Making) untuk dibagi menjadi sub bab agar mudah dimengerti argumentasi penulis.

## **2.1 KONDISI POLITIK DOMESTIK INDONESIA**

Dalam penjelasan ini terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Maka dari itu sesuai teori penulis membagi kedalam empat sub bab, *Pertama*, birokrasi, dalam hal ini melihat aspek dari birokrasi pemerintah Indonesia dalam mendorong menerima keanggotaan Timor Leste; *Kedua* , partai politik, merupakan komponen kedua yang dibahas, dalam hal ini meninjau peran partai politik yang ada di Indonesia dalam menentukan kebijakan ratifikasi; *Ketiga*, kelompok kepentingan, hal ini juga merupakan salah satu hal yang penting untuk dibahas, mengingat hal ini meyangkut mengenai bisnis dan ekonomi.

Dengan demikian akan juga dibahas mengenai kelompok kepentingan terutama kelompok bisnis dan ekonomi; *Keempat*, media massa, dalam peran pemberitaan.

### **2.1.1 Birokrasi**

Dalam hal ini terdapat pihak “*bureaucratic influencer*” yang mempengaruhi terciptanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. William D. Coplin menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut adalah mereka yang masuk kedalam lembaga eksekutif dalam sebuah pemerintahan (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 81-2). Dengan demikian maka dalam penerimaan bergabungnya Timor Lest ke ASEAN juga dipengaruhi oleh birokrat dalam hal ini kementerian.

#### **a. Kementerian Luar Negeri**

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap bergabungnya Timor Leste menjadi anggota ASEAN juga berasal dari Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mendapatkan mandat undang-undang untuk mengatur hubungan luar negeri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar negeri. Menurut peraturan tersebut kementerian ini memiliki delapan fungsi (kemlu, 2019) yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

- d. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
- h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dengan melihat mengenai fungsi dari Kementerian Luar Negeri maka diketahui bahwa urusan luar negeri, kemudian urusan diplomasi, negosiasi dan hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri. Dalam konteks penerimaan Timor Leste bergabung ASEAN, Aplikasi pengajuan menjadi anggota resmi Timor Leste diajukan pada 2011 yang langsung diberikan Menteri Timor Leste kala itu, Zacarius Da Costa kepada Menteri Marty Natalegawa yang saat itu mewakili Indonesia setelah pertemuan ke-5 Komisi Bersama Tingkat Menteri RI-Timor Leste pada tahun 2011(Kedubes Indonesia di Ottawa, 2011). Artinya dapat dilihat bahwa Timor Leste dalam mengajukan aplikasi penerimaannya diawali dengan meminta restu dari Indonesia selaku kerabat terdekatnya, tentu hal ini menjadi wajar karena Timor Leste sempat menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang mana tentu secara kultur hubungan Timor Leste paling dekat dengan Indonesia.

Bahkan era Presiden Jokowi (era sekarang), dukungan Indonesia tetap konsisten hingga sekarang, ini terlihat seperti pernyataan Retno Marsudi sebagai berikut;

*“Dukungan untuk Timor Leste yang sudah mengajukan diri sebagai negara anggota ASEAN bukan baru diberikan Indonesia. Sejak awal Indonesia sudah menyampaikan dukungannya, dan pada saat pleno saya sampaikan kembali dukungan Indonesia untuk Timor Leste,”*

Dukungan Indonesia bagi Timor Leste diberikan secara politis dan konkret melalui berbagai bantuan pengembangan kapasitas untuk mempersiapkan negara tersebut sebelum masuk ASEAN. Sejak mengajukan diri menjadi anggota ASEAN pada 2011, Timor Leste terus berupaya memenuhi sejumlah prasyarat dan keselarasan baik dalam pilar politik, ekonomi, serta sosial budaya.

Bantuan Indonesia dalam menerima Timor Leste tidak hanya sampai disitu, dalam mempersiapkan Timor Leste bergabung ASEAN. Indonesia juga turut serta dalam kerjasama-kerjasama dalam menyiapkan negara tersebut bergabung ASEAN, Kerja seperti pembangunan infraskturktur juga dibantu Indonesia.

### **2.1.2 Partai Politik**

Pada komponen kedua adalah partai politik, dimana menurut William D. Coplin, partai politik merupakan *partisan influencer*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kelompok kedua ini melakukan keberpihakan terhadap aktor politik yang ada dalam hal ini eksekutif. Selain itu partai politik berfungsi dalam menyalurkan tuntutan-tuntunan masyarakat kepada pengambil kebijakan, dengan demikian pengambil kebijakan dapat ditekan oleh kelompok ini (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 84-5).

Di dalam konteks ini Anggota DPR kader partai, yang terdiri dari fraksi-fraksi menurut UU No 17 tahun 2014 pasal 82. Maka dari itu karena DPR berasal dari partai politik maka dapat

dikatakan suara anggota DPR merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. Dalam konteks ini ketika Presiden Timor Leste Francisco Guterres bertemu dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsuet) yang juga merupakan kader Golkar dan pimpinan DPR lainnya di DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan itu DPR menyampaikan dukungannya kepada Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN.

*"Kami akan mendukung Timor Leste menjadi Anggota ASEAN, itu yang paling penting," kata Bamsuet saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/6/2018). "Kesepakatan atas isu yang penting terhadap batas darat dan batas laut kepada presiden dan beliau menerima dan memberikan apresiasi dan berjanji kedua negara akan membicarakannya pada tingkat yang lebih serius dan lebih cepat,"*

Sementara itu, Guterres menyampaikan kunjungannya ke DPR ini merupakan yang pertama kalinya. Dia menyatakan banyak banyak gagasan dan topik yang ingin dibicarakan. Apalagi jika dilihat dari sejarah kedua negara ini sangat berhubungan erat dan bertetangga secara geografis.

*"Cara kita bergandengan tangan, berjalaan bersama untuk masa depan kedua negara dan rakyatnya. Dalam konteks inilah kita akan mengembangkan pemikiran ini, hubungan kerja sama ke depan dan hubungan persahabatan,"*

### **2.1.3 Kelompok Yang Berkepentingan**

Variabel ketiga ini adalah *"interest influencers"* yaitu terdiri dari beberapa orang yang bergabung dalam sebuah kelompok dengan memiliki tujuan dan kepentingan bersama (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 87). Dalam hal ini kelompok yang akan menikmati jika

Timor Leste bergabung ASEAN adalah PT Wijaya Karya Tbk Maka kelompok kepentingan yang perlu untuk dijabarkan adalah kelompok penguasa.

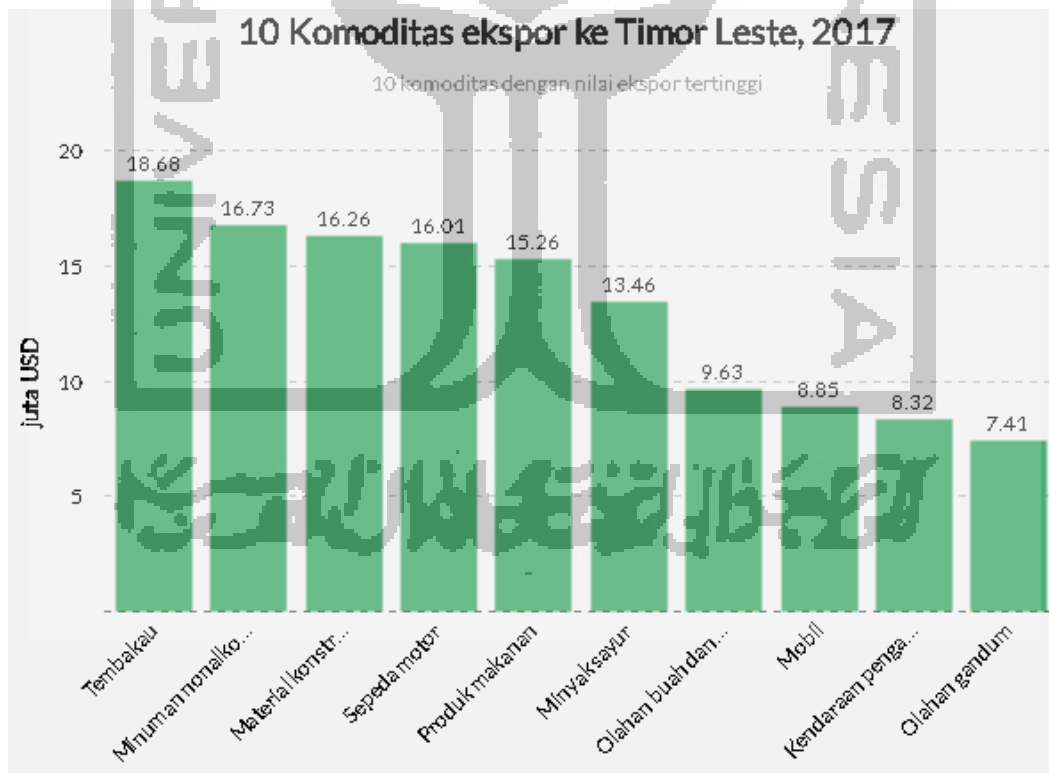
### **Kementerian Badan Usaha Milik Negara (PT. WIKA)**

Sebagai negara yang baru merdeka Timor Leste tentunya membutuhkan impor dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kebutuhan dalam negeri tersebut hanya dapat diraih jika Timor Leste menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan negara-negara mitra strategis Timor Leste. Mitra strategis yang dimaksud adalah negara yang dapat memberi profit bagi Timor Leste secara finansial. Artinya secara geografis dekat dengan Timor Leste sehingga *Coast* atau harga yang dikeluarkan Timor Leste minim. Itulah yang dimaksud dengan mitra strategis. Jika dilihat secara geografis maka Indonesia adalah negara menguntungkan secara finansial bagi Timor Leste.

Dari data Kementrian Perdagangan Indonesia yang diolah penulis menunjukkan, ekspor nonmigas ke Timor Leste berhasil menembus US \$200 juta sejak 2013. Namun, peningkatan tiap tahunnya sangat tipis. Begitu juga dengan ekspor migasnya, Jika dilihat dari periode waktu yang sama, maka kinerja ekspor migas ke Timor terbilang turun. Tahun 2013 mencatatkan waktu tertinggi pencapaian ekspor migas, dengan total nilai perdagangan sebesar US \$13,34 juta. Setelahnya, nilai perdagangan itu cenderung turun, meski tidak drastis (Kementerian Perdagangan, 2019).



Grafik .1 ( data diolah dari (Kementerian Perdagangan, 2019))



Grafik 1.2 (data diambil dari (Kementerian Perdagangan, 2019)).



Dari data yang sama khususnya non-migas, tahun 2017 ekspor Indonesia ke Timor Leste seperti Tembakau nilainya hampir 18,68 juta USD, bahkan ekspor olah gandum (mengingat gandum di Indonesia sendiri tidak dapat tumbuh), ekspor olah gandum ini nilai ekspornya mencapai 7,41 juta USD, apalagi ekspor minyak sayur dan produk makanan masing-masing mencapai 16,01 dan 15,26 juta USD. Artinya dari melihat ini tentu Timor Leste bergantung pada Indonesia untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya (Kementerian Perdagangan, 2019). Ketergantungan inilah yang kemudian mengharuskan Timor Leste menjadikan Indonesia sebagai mitra bisnis yang strategis. Apalagi secara geografis Indonesia merupakan negara terdekat dengan Timor Leste yang berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara yang juga menggunakan bahasa tetun sebagai bahasa daerah mereka. Persamaan bahasa ini terjadi karena kedekatan geografi dan mobilisasi penduduk yang berpindah dari TTU ke Timor Timur semasa Timor Leste masih menjadi provinsi Indonesia.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Sebagai bangsa muda Timor Leste menghadapi banyak kesulitan, tetapi juga mengharuskan bangsa itu berjuang untuk maju sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Salah satu bidang yang menunjang pengembangan infrastrukturnya. Karena dengan infrastuktur lah yang menunjang roda ekonomi bangsa, dan infrastruktur mendorong modernisasi untuk melancarkan proses aktifitas sebuah negara, dengan jalan dapat menghubungkan jarak yang jauh menjadi dekat karena itulah yang membuka proses ekonomi, dengan didirikan rumah sakit, sekolah, pelabuhan dan bandara maka akan memudahkan pelayanan masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor-Leste saat ini memberikan suara apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi negara merdeka. Pada akhirnya, 78,5

persen pemilih memberikan suara untuk kemerdekaan. Selama masa ini, kekerasan meletus dan sekitar 70 persen infrastruktur di Timor-Leste hancur. Republik Demokratik Timor-Leste secara resmi menjadi negara berdaulat pada 20 Mei 2002. Sejak itu berdiri, negara tersebut telah bekerja untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Infrastruktur yang rusak dan terbelakang di Timor-Leste adalah salah satu tantangan utama yang sedang dikerjakan negara ini dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah Timor-Leste membuat dan merilis rencana strategis yang ingin diselesaikan pada tahun 2030, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan dan standar pendidikan. Termasuk dalam rencana ini adalah seluruh bagian tentang pengembangan infrastruktur negara. Di bagian ini, rencana untuk memperbaiki jalan raya, jembatan, saluran air, teknik sanitasi, listrik, pelabuhan, bandara dan telekomunikasi disusun.

Beberapa tahun lalu, pemerintah Timor-Leste membuka bandara yang bernama Bandara Suai, pada 20 Juni 2017, pembukaan bandara ini menjalin kerja sama dengan BUMN Indonesia PT Wijaya Karya (WIKA) dengan nilai proyeknya US\$ 67 juta. Pembukaan bandara ini termasuk dalam rencana pengembangan strategis dan merupakan contoh dari banyak cara infrastruktur di Timor Leste yang sedang diperbaiki (Nn, Bangga! BUMN RI Garap Proyek Bandara Suai dan Oekusi di Timor Leste, 2017).

Selain pembukaan Bandara Suai, Timor Leste juga membuka Bandara Internasional Presidente Nicolau Lobato yang digarap oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau disebut juga WIKA yang telah resmi merampungkan proyek pembangunan Bandara Internasional Oucusse. Yang berlokasi di Timor Leste pada Selasa, 18 Juni 2019. Pembangunan tersebut menelan nilai kontrak sebanyak US\$119 juta dan dilaksanakan dalam waktu dari 2015 hingga 2018. Dengan melibatkan lebih dari 500 tenaga kerja gabungan, yakni dari Indonesia dan Timor Leste.

Francisco Guterres selaku Presiden Republik Demokratik Timor Leste ikut meresmikan dan mengapresiasi kinerja PT Wijaya Karya dalam proyek pembangunan infrastruktur beserta penunjangnya. Francisco mengatakan, “WKA sebagai (holding) BUMN Indonesia telah berperan besar dalam hubungan (antara) Indonesia-Timor Leste. Baik dalam pembangunan Oecusse maupun negara Timor Leste, kesuksesan ini (nantinya) bakal direplikasi pada distrik-distrik lainnya.” PT Wijaya Karya juga telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur kebandaraan, seperti ComorroBridges 1&2, NataboraBridges, serta Batugade Maliana Road yang berlokasi di satu wilayah dengan Bandara Internasional Oecusse (Nn, PT Wijaya Karya Rampungkan Bandara Oecusse di Timor Leste, 2019).

Sedangkan pada titik lain, PT Wijaya Karya tengah membangun sarana pembangkit energi tenaga diesel yang berlokasi di Loro Sae. Tepatnya terletak di sebelah utara Timor Leste, yakni berjarak sekitar 30 kilometer dari Ibukota Timor Leste, Dili. Serta pembangunan PLTD Betano yang berlokasi di wilayah selatan.

Contoh lain dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Timor-Leste adalah proyek perluasan jalan yang sedang dijalani negara ini. Bank Dunia saat ini membantu untuk mendanai proyek perluasan jalan Timor-Leste. Pada April 2017, kredit \$ 35,2 juta diberikan kepada Timor-Leste dari Bank Dunia untuk memperluas proyek transportasi nasional.

Proyek ini akan membuat jalan raya lebih aman bagi wisatawan dan meningkatkan peluang perjalanan antara bagian utara dan selatan negara itu. Memiliki jalan raya yang dapat diandalkan akan membantu Timor-Leste dalam mengembangkan aspek-aspek infrastruktur lainnya dan mengarah pada peningkatan peluang ekonomi di dalam negara. Jalan raya ini akan mempromosikan pembangunan pedesaan dan mendukung pertumbuhan layanan kesehatan dan pendidikan di Timor-Leste.

Pengembangan infrastruktur di Timor-Leste masih berlangsung, tetapi kemajuan dapat dilihat. Pembukaan bandara kedua dan proyek transportasi utama hanyalah dua contoh pekerjaan yang dilakukan pada infrastruktur di negara ini. Pemerintah Timor-Leste berencana untuk terus membangun kemajuan ini dengan harapan bahwa infrastruktur yang dikembangkan akan meningkatkan standar kehidupan bagi setiap warga negaranya (Stout, 2018).

#### 2.1.4 Media Massa

Variabel keempat adalah Media Massa atau “*mass influencers*”, dalam hal ini adalah media massa yang dapat melakukan pembuatan opini dalam masyarakat (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 88-9). Secara garis besar terdapat tiga jenis “*framing*” yang dilakukan oleh media mengenai sebuah isu. Dengan demikian keluaran dari sebuah opini terbentuk oleh adanya pemberitaan media masa. Adapun tiga jenis tersebut adalah; *Pertama*, positif, dalam hal ini media massa sebagai mass influencer memberikan opini dan pemberitaan yang positif mengenai sebuah isu. *Kedua*, negatif, pada konteks ini media massa memberikan opini atau pemberitaan yang lebih menyudutkan suatu isu. *Ketiga*, netral, dalam hal ini media massa tidak melakukan framing dan atau pemberitaan yang positif maupun negatif. Melainkan secara objektif melaporkan perkembangan terakhir.

Dalam konteks ini peran media dalam melakukan framing terkait penerimaan Indonesia terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEA merupakan hal yang penting, adapun beberapa pemberitaan di beberapa media online mengenai penerimaan Indonesia sebagai berikut;

No.	Nama Media	Isi	Situs
1.	Detik News	RI akan Terus Dorong Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4552987/ri-akan-terus-dorong-timor-">https://news.detik.com/berita/d-4552987/ri-akan-terus-dorong-timor-</a>

			<a href="#">leste-jadi-anggota-asean</a>
2.	Republika	Indonesia Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://internasional.republika.co.id/berita/pvjkpz382/indonesia-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean">https://internasional.republika.co.id/berita/pvjkpz382/indonesia-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean</a>
3.	Tempo	Indonesia Diminta Terus Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://nasional.tempo.co/read/1101805/indonesia-diminta-terus-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/full&amp;view=ok">https://nasional.tempo.co/read/1101805/indonesia-diminta-terus-dukung-timor-leste-jadi-anggota-asean/full&amp;view=ok</a>
4.	Kompas	Satu Negara Keberatan Timor Leste Gabung ASEAN	<a href="https://internasional.kompas.com/read/2011/05/24/13135992/Satu.Negara.Keberatan.Timor.Leste.Gabung.ASEAN">https://internasional.kompas.com/read/2011/05/24/13135992/Satu.Negara.Keberatan.Timor.Leste.Gabung.ASEAN</a>
5.	Cnn Indonesia	Menlu Sebut RI selalu Dukung Timor Leste Jadi Anggota ASEAN	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180131132539-106-272896/menlu-sebut-ri-selalu-dukung-timor-leste-jadi-anggota-aseanr">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180131132539-106-272896/menlu-sebut-ri-selalu-dukung-timor-leste-jadi-anggota-aseanr</a>
6.	Tribunnews	Ketua DPR Dukung Timor Leste Masuk Anggota ASEAN	<a href="https://www.tribunnews.com/internasional/2018/06/29/ketua-dpr-dukung-timor-leste-masuk-anggota-asean">https://www.tribunnews.com/internasional/2018/06/29/ketua-dpr-dukung-timor-leste-masuk-anggota-asean</a>

(Tabel 1.1)

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa media menetapkan framing positif se framing positif sesuai dengan fakta objektif. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa media massa memberitakan secara netral. Selain itu isu ini tidak menjadi pokok bahasan oleh media, karena meskipun urgen bagi pemerintah namun tidak dipandang urgen bagi media di Indonesia.

## **2.2 KONDISI EKONOMI DAN KEAMANAN**

Dalam penejelasan ini terdapat tiga faktor determinan dalam mempengaruhi suatu negara dalam mengambil kebijakan. Maka dari itu sesuai teori penulis menganalisa tentang pengeluaran-pengeluaran Indonesia kepada Timor Leste semasa ankesasi Indonesia. Ini menjadi penting karena mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dan juga menjadi titik balik dalam investasi masa depan.

### **2.2.1 Kondisi Ekonomi (Pengeluaran Indonesia)**

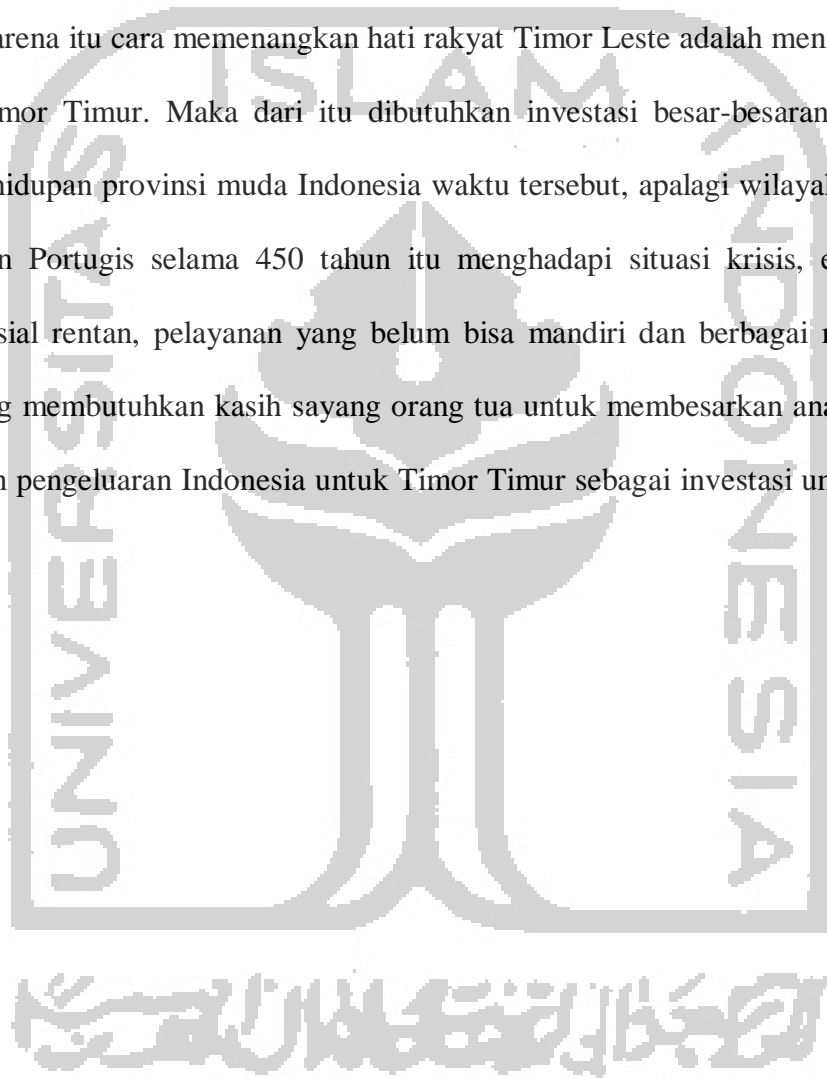
Aspek kemampuan ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam penentuan kebijakan luar negeri suatu negara. dimana kemampuan ekonomi juga dijadikan sebagai alat politik luar negeri suatu negara. Willian D. Coplin menyebut bahwa Kemampuan ekonomi suatu Negara memainkan peran penting dalam politik luar negeri Negara itu. (Coplin, 2003, pp. 115-20).

Dalam konteks ini jika melihat ketika Timor Leste masih menjadi salah satu provinsi di Indonesia, gelontoran dana telah banyak dikeluarkan oleh Indonesia sebagai kompensasi bagi rakyat Timor Timur. Sebelum referendum, Timor Leste yang disebut Timor Timur pernah menjadi provinsi ke 27 sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Timor Timur yang sebelumnya dijajah 450 tahun oleh Portugis, akhirnya melepaskan diri dari Portugis setelah terjadi revolusi bunga di Portugis yang mengharuskan Portugis melepas wilayah-wilayah koloninya. Kemudian pada tahun 1976 Indonesia menjadikan sebagai provinsi ke 27 wilayah Indonesia.

Mengingat Timor Timur merupakan jajahan Portugal dan disatu sisi berdasarkan Konferensi Meja Bundar wilayah kedaulatan Indonesia adalah wilayah yang dijajah oleh Belanda, maka secara historis Timor Timur tidak memiliki kewajiban untuk menjadi wilayah

kedaulatan Indonesia. Untuk itulah strategi yang paling masuk akal bagi Indonesia waktu itu adalah memenangkan hati rakyat Timor Timur untuk membentuk identitas Timor Timur menjadi bangsa Indonesia, apalagi di Timor Timur ada FRETELIN yang menghendaki Timor Timur menjadi negara berdaulat.

Oleh karena itu cara memenangkan hati rakyat Timor Leste adalah meningkat taraf hidup masyarakat Timor Timur. Maka dari itu dibutuhkan investasi besar-besaran Indonesia untuk menunjang kehidupan provinsi muda Indonesia waktu tersebut, apalagi wilayah yang baru lepas dari penjajahan Portugis selama 450 tahun itu menghadapi situasi krisis, ekonomi lumpuh, ketegangan sosial rentan, pelayanan yang belum bisa mandiri dan berbagai masalah layaknya anak kecil yang membutuhkan kasih sayang orang tua untuk membesarkan anak itu. Berikut ini akan dijelaskan pengeluaran Indonesia untuk Timor Timur sebagai investasi untuk mendapatkan wilayah itu.



Tabel 1.1 (yang dikutip dari Tesis Rui Gomes)

**Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp milyar)**

	Repelita I (1969/70- 1973/74) (Rp milyar)	Repelita II (1974/75- 1978/79) (Rp milyar)	Repelita III (1979/80- 1983/84) (Rp milyar)	Repelita IV (1984/85- 1988/89) (Rp milyar)	Repelita V (1989/90- 1993/94) (Rp milyar)	Total (Rp milyar)	Total (US\$ jt) <sup>a</sup>
Timor Timur	...	66.692	139.385	257.822	826.312	1.290.481	960,2
Nusa Tenggara Timur	2.223	24.788	129.296	175.199	526.309	857.815	641,2
Nusa Tenggara Barat	1.728	22.826	111.765	151.629	332.782	620.730	494,7
Papua (Irian Jaya)	1.469	15.825	87.388	155.224	652.353	912.259	609,5

Sebagai fakta, Indonesia memberikan investasinya yang besar dalam pembangunan Timor-Leste sebagai bukti niat baiknya kepada rakyat Timor-Leste. Memang benar bahwa Indonesia telah melakukan investasi di Timor-Leste lebih banyak daripada provinsi-provinsinya. Jika dilihat dari data diatas sebanyak Rp 1,3 milyar telah dialokasikan untuk pembangunan di wilayah ini antara 1976/1977 dan 1993/1994 (setara dengan US\$ 960 juta). Sebagai perbandingan, jumlah ini adalah 50% lebih banyak daripada yang dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertetangga (Gomes, 2002).

Investasi ini memang mengakibatkan pertumbuhan PDB pesat apalagi setelah operasi operasi militer besar selesai yang menandakan kondusifitas keamanan dan suatu keadaan yang mendekati normal tercipta pada pertengahan 1980-an. Menurut data resmi, PDB tumbuh rata-rata sebesar 8,5% per tahun antara 1984 dan 1997, melampaui pertumbuhan PDB nasional Indonesia dan pertumbuhan PDB di provinsi manapun. Secara keseluruhan gambaran yang disajikan



mengenai perekonomian Timor-Leste semasa pendudukan cukup meyakinkan. Pertumbuhan digerakkan oleh konstruksi, transportasi dan komunikasi, serta pelayanan pemerintah, semuanya adalah sektor yang berhubungan dengan konsolidasi pendudukan. Juga terjadi pertumbuhan pesat di sektor perdagangan dan manufaktur, walaupun secara keseluruhan pangsa keduanya rendah, khususnya manufaktur. Sementara sektor pertanian, yang mempekerjakan 84% penduduk pada tahun 1990, mencatat pertumbuhan terendah di antara sektor-sektor utama lainnya (Gomes, 2002).

Tabel 1.2

**Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)**

	Pangsa Sektoral			Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan 1984-1997
	1984	1993	1997	
Pertanian	44,5	29,8	33,7	5,4
Manufaktur	1,4	2,9	3,1	13,7
Konstruksi	11,4	21,0	18,1	12,7
Perdagangan	8,4	9,3	9,1	11,5
Transportasi & Komunikasi	5,4	8,6	9,7	14,9
Pelayanan Pemerintah	21,7	21,5	19,9	8,1
PDB	92,8	93,1	93,6	11,05

Tabel 1.3 (Dari diambil dari (KORPRI Timor Timur, 1997))

**Anggaran dan dana intruksi Presiden (inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor  
Timur, 1976/77-1992/93**

<b>Tahun</b>	<b>Proyek sektoral</b>	<b>Anggaran rutin (Rp juta)</b>	<b>Anggaran Total (Rp juta)</b>	<b>Anggarab Khusus (Rp juta)</b>	<b>Dana Inpres (Rp juta)</b>	<b>Proyek Sektoral (US\$,000)</b>	<b>Anggaran Rutin (US\$'000)</b>
1976/77	232,8	1.475,6	1.708,4	...	552,0	561,0	3.555,7
1977/78	3.500,0	3.261,6	6.761,6	...	3.359,7	8.433,7	7.859,4
1978/79	4.333,5	3.134,5	7.468,0	...	3.997,0	8.824,1	6.382,6
1979/80	7.517,2	3.150,0	10.667,2	7000,0	5.152,9	11.996,8	5.027,1
1980/81	12.415,7	6.954,4	19.370,1	6.000,0	9.087,5	19.801,8	11.091,5
1981/82	11.213,2	8.435,5	19.648,7	6.500,0	14.884,6	17.617,0	13.252,9
1982/83	28.220,9	8.846,8	37,067,7	...	19.113,9	41.864,6	13.123,9
1883/84	22.871,4	9.432,1	32.303,5	7.000,0	20.826,0	23,257,5	9.591,3
1984/85	23.694,8	20.015,1	43.708,8	8.135,6	22.940,8	22,577,2	19.071,0
1985/86	35.181,2	13.038,6	48,219,8	14.147,8	24.192,3	31.406,2	11.639,5
1986/87	25.555,6	13.071,3	38.626,9	7.512,7	22.735,2	18.116,8	9.266,5
1987/88	15.075,7	11.218,1	26.293,8	5.372,6	...	9.142,4	6.803,0

<b>1988/89</b>	<b>14.265,8</b>	<b>11.516,3</b>	<b>25.802,1</b>	<b>6.379,7</b>	...	<b>8.371,4</b>	<b>6.748,5</b>
<b>1989/90</b>	<b>18.324,6</b>	<b>14.765,2</b>	<b>33.089,8</b>	...	...	<b>10.253,2</b>	<b>8.261,6</b>
<b>1990/91</b>	<b>25.641,3</b>	<b>17.037,2</b>	<b>42.678,7</b>	...	...	<b>13.720,0</b>	<b>9.116,3</b>
<b>1991/92</b>	<b>31.351,7</b>	<b>18.859,4</b>	<b>50.211,1</b>	...	...	<b>15.891,2</b>	<b>9.559,2</b>
<b>1992/93</b>	<b>40.083</b>	<b>18.832,4</b>	<b>59.026,0</b>	...	...	<b>19.674,8</b>	<b>9.290,7</b>
<b>Total</b>	<b>319.508,8</b>	<b>183.144,4</b>	<b>502.653,2</b>	...	...	<b>281.509,5</b>	<b>159.640,7</b>

Dari data (KORPRI Timor Timur, 1997) diatas jelas bahwa dalam masa perang yang paling keras, antara 1975-1979, kegiatan pertanian hampir sepenuhnya lumpuh. Kemudian, pengekangan banyak penduduk di dalam kamp-kamp “pemukiman kembali”, yang di dalamnya mereka terus dibatasi sebagian bahkan sampai akhir dasawarsa 1980-an dan kebebasan bergerak serta kemampuan bertani mereka dibatasi dengan ketat, membuat pemulihan berlangsung sangat pelan (antara 1983 dan 1986 sektor ini tumbuh di bawah 1% per tahun). Produksi dua bahan pangan utama, jagung dan beras, sampai akhir dasawarsa 1980-an belum pulih ke tingkat produksi masa sebelum perang.

Bahkan setelah keadaan sudah mulai kembali normal, kondisinya masih belum mendukung untuk pertumbuhan pertanian. Gangguan terhadap pola pemukiman tradisional penduduk pada tahun-tahun awal pendudukan memiliki dampak jangka panjang. Banyak penduduk yang terus dipaksa untuk tinggal di lahan yang lebih ditentukan oleh pertimbangan keamanan dan bukan karena kesuburannya. Perpindahan penduduk dan ketentuan hukum pertanahan yang baru mengakibatkan ketidakpastian hak atas tanah. Petani dihambat untuk

berpindah dari pola pertanian untuk keperluan sendiri ke pola pertanian untuk menghasilkan uang oleh karena genggam tangan besi militer dan mitra bisnisnya atas produksi.

Yang tidak kalah penting, pertanian dirugikan karena tingkat investasi yang rendah. Kurang dari 10% investasi negara diarahkan ke sektor pertanian, sementara lebih dari 50% dicurahkan ke dua sektor utama, yaitu transportasi dan komunikasi serta sektor pemerintahan sipil. Lebih lagi, penerima manfaat utama dari investasi di sana kemungkinan adalah transmigran Indonesia dan sektor perkebunan.

### **2.3 KEMAMPUAN MILITER INDONESIA**

Pada konteks ini William D. Coplin menerangkan bahwa kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Lebih lanjut William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

Pada hal ini William D. Coplin menerangkan bahwa Pada hal ini kemampuan suatu negara atau kapasitas penggunaan kekuatan militer juga mempengaruhi pengambilan kebijakan suatu negara (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124).

William D. Coplin menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu diukur untuk melihat pengaruh determinan faktor militer. *Pertama*, kapasitas penggunaan kekuatan militer; *Kedua* tingkat ketergantungan senjata dan pendanaan dari sumber-sumber luar negeri; *Ketiga*, Kestabilan internal dan kemampuan militer (Coplin, 2003, pp. 124-30).

### 2.3.1 Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer

William D. Coplin menerangkan dalam komponen ini dimana dapat dihitung dari jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya, (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, p. 124). Indonesia merupakan salah satu negara dengan anggaran pertahanan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam anggaran belanja pertahun negara (APBN) 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana kepada sektor pertahanan dengan jumlah sebesar Rp. 107 trilyun. Besaran ini membuat anggaran pertahanan menjadi sektor penerima alokasi APBN terbesar kedua setelah alokasi dana untuk infrastruktur. Selain menjadi negara dengan anggaran pertahanan yang besar, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang cukup kuat di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1.4: Alokasi APBN Untuk Bidang Pertahanan** (kemenkeu, 2019)

No.	Tahun	Alokasi Anggaran
1.	2015	Rp. 105,9 T
2.	2016	Rp. 108,7 T
3.	2017	Rp. 120,0 T
4.	2018	Rp. 107, 6 T
5.	2019	Rp. 108,4 T

Selain memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar, Indonesia juga memiliki angkatan bersenjata yang terdiri dari tiga (3) korps, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Selain itu tugas pengamanan juga dibantu oleh Kepolisian Republik Indonesia. Secara kuantitas, jumlah tentara Indonesia berjumlah 676.200 personel. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara terkuat keempat di Asia (Tempo, 2016). Selain itu juga

dibantu oleh aparat kepolisian yang berjumlah 430.000 personel (Jaya, 2016). Dengan angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah personel polisi terbanyak di dunia. Dengan adanya jumlah personel yang besar ini maka akan mendukung adanya pengamanan terhadap ancaman yang muncul.

### **2.3.2 Tingkat Ketergantungan pada Sumber-sumber Luar Negeri**

Indikator kedua adalah tingkat ketergantungan pada sumber-sumber luar negeri. Dalam hal ini diterangkan oleh William D. Coplin bahwa kekuatan militer suatu negara tidak menjadi satu tolak ukur, melainkan juga sejauhmana negara tersebut mengalami ketergantungan alutista dengan negara lain. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan negara tersebut (Coplin, 2003, p. 126]). Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan wilayah territorial yang sangat luas, serta memiliki salah satu personel militer dan keamanan terbesar di dunia. Tentu, hal tersebut mendorong Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang mengandalkan impor senjata atau alutista dari luar negara. Pada tahun 2018, tercatat bahwa Indonesia merupakan negara importer senjata terbesar ke sepuluh di dunia (Muhaimin, 2018). Angka ini juga di ikuti dengan kelonjakan impor senjata sebesar 677% di awal 2018. Dengan total nilai sebesar US\$ 39 juta menjadi US\$ 15,1 miliar atau 0,26 persen dibandingkan Desember 2017 (Praditya, 2018).

Dari angka impor tersebut, impor senjata Indonesia terbanyak berasal dari Tiongkok (648 unit), Inggris (505 unit) dan Amerika Serikat (462 unit). Adapun belanja persenjataan tersebut dialokasikan terhadap tiga korps dalam tentara nasional Indonesia. Angkatan Laut mendapatkan alokasi 39,7%, (977 unit) Angkatan Darat sebanyak 45,5%(1,118 unit). Sementara itu alutista yang paling banyak diimpor Indonesia adalah C-705, Starstreak, FGM-148 Javelin, AGM0114K Hellfire, dan Mistral (Hartiani, 2016).

Meskipun menjadi negara dengan tingkat impor yang besar, setidaknya Indonesia memiliki kemampuan untuk memproduksi alutista secara mandiri. Diantara beberapa alutista yang dikembangkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut; *Pertama*, kendaraan tempur seperti panser dan tank, melalui PT Pindad dan beberapa perusahaan nasional lain, Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan tempur secara mandiri seperti Panser Anoa dan Tank Harimau (Katadata, 2018). Dalam perkembangannya bahkan Indonesia telah mampu untuk di ekspor ke luar negeri seperti Panser Anoa yang diekspor Brunei Darussalam dan Bangladesh; *Kedua*, pengembangan jet tempur bersama dengan Korea Selatan (Detik, 2018); *Ketiga*, melakukan ekspor kapal perang ke Filipina; *Keempat*, pengembangan kapal selam bersama Korea Selatan dengan adanya transfer teknologi (Kompas, 2019); *Keenam*, mampu memproduksi amunisi dan senjata senjata laras panjang dan otomatis oleh PT Pindad (Pindad, 2018). Dengan kemampuan-kemampuan ini, maka menunjukkan bahwa Indonesia dapat secara mandiri dalam bidang alutista meskipun juga dibarengi dengan impor senjata.

### **2.2.3 Kestabilan Internal dan Kemampuan Militer**

Indikator ketiga menurut William D. Coplin merupakan peran militer juga dipengaruhi oleh adanya keamanan kestabilan internal dan sejauh mana kemampuan dan strategi militer tersebut berfungsi (Coplin, 2003, p. 128). Jika dilihat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dimana terdapat sekitar 250 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga merupakan multikultural Dengan keanekaragaman ini, tentu memungkinkan terjadinya gesekan dalam masyarakat. Hal kestabilan internal maka terdapat beberapa hal yang mengancam stabilitas keamanan internal Indonesia. diantara ancaman-ancaman yang ada adalah sebagai berikut (Aizid, 2013);

*Pertama*, Pemberontakan G30S/PKI. Gerakan G30S/PKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30S/PKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakangnya. Otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya Pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap enam orang jenderal TNI AD. Tiga jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan Tiga jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Soeprapto dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup.

*Kedua* Proklamasi PRRI/PERMESTA ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957 yaitu oleh Letkol Ventje Sumual.

Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual, Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan, Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.



*Ketiga*, Pemberontakan DI/TII. Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh.

*Keempat*, ancaman agresi negara asing, Indonesia dapat dihadapkan pada beberapa agresi yang dilakukan oleh negara asing. Dengan ancaman-acaman diatas, dapat memicu ketidakstabilan internal Indonesia, meskipun demikian, Indonesia memiliki jumlah Tentara terbanyak pertama di Asia Tenggara. Selain itu juga ditunjang dengan kepolisian yang juga memiliki personel yang berkualitas dan handal. Dengan demikian ancaman-ancaman yang berpotensi untuk mengganggu stabilitas Indonesia dapat diatasi, oleh karena itu dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi Indonesia yang aman ini juga dipertegas dengan temuan The Gallup Law and Order yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling aman kesembilan di dunia (Putra, 2018).

## **2.4 KONTEKS INTERNASIONAL**

Pelanggar HAM selalu menjadi stigma internasional ketika mengingat masa pendudukan Indonesia di Timor Leste, itulah yang kemudian dalam *Decision Making* sifat sistem internasional dan hubungan antara negara dengan kondisi-kondisi dalam sistem, menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku (Coplin, Pengantar Politik Internasional, 1992, pp. 164-62). Kesan bahwa semasa pendudukan Indonesia di Timor Leste penuh citra kekerasan dan

perampasan hak asasi, itulah yang menjadi alasan Timor Leste mendapat simpati global (Araujo, 2014).

Berdasarkan analisis kuantitatifnya, *Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor (CAVR)* menemukan bahwa sekitar 18.600 pembunuhan tidak sah (illegal) dan penghilangan paksa terhadap orang Timor-Leste yang bukan kombatan dilakukan antara tahun 1974 dan 1999, yang mayoritas besarnya, 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk Milisi pro Indonesia sebagai pembantunya. Pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa dilakukan oleh gerakan Perlawanan dan pasukan keamanan Indonesia. Profil temporal dari pembunuhan dan penghilangan yang berkaitan dengan gerakan Perlawanan sangat berbeda dengan profil pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia (The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR), 2013).

Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan oleh anggota-anggota Perlawanan sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun awal konflik, terutama pada waktu dan sesudah konflik antar-partai yang dikenal sebagai “perang sipil” dan pada waktu pembersihan internal partai Fretilin pada tahun 1976 dan 1977-1978. Sementara 49,0% (561/1.145) dari semua pembunuhan dan penghilangan pada tahun 1975 yang didokumentasikan dilakukan oleh Fretilin/Falintil, persentasenya menurun tajam (meskipun pada 1976-1984 angka mutlak pembunuhan dan penghilangan tidak turun) pada periode sesudahnya, menurun menjadi 16,6% (563/3.398) pembunuhan dan penghilangan 1976-1984, sampai 3,7% (18/488) pada 1985-1998 dan menjadi 0,6% (5/898) pada tahun 1999. Ada peningkatan terkait dalam persentase pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan Timor-Leste pembantunya (The Timor-Leste Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR), 2013).

Laporan dari CAVR diatas seolah memberikan tamparan tegas bagi pencitraan Indonesia di dunia global. Indonesia dikenal di internasional sebagai negara pembela hak kemerdekaan bangsa lain, juga dikenal sebagai negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia. Namun ketika hasil penelitian tersebut muncul, citra Indonesia sedikit banyak tercoreng. Maka dari itu menjadi masuk akal jika Indonesia paling terdepan membela Timor Leste bergabung karena rasa bersalah masa lalu yang ingin ditebus. Fakta pelanggaran HAM diatas memberikan kesan bahwa semasa pendudukan Indonesia di Timor Leste penuh citra kekerasan dan perampasan hak asasi, itulah yang menjadi alasan Timor Leste mendapat simpati global.

